

**ANALISIS PENGARUH KOMISARIS INDEPENDEN, KOMITE AUDIT, DAN
KUALITAS AUDIT TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (TAX
AVOIDANCE)**

(Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017)

SKRIPSI



Oleh :

Nama : Kustanti

Nomor Mahasiswa : 144214926

Jurusan : Akuntansi

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA

YOGYAKARTA

2018

**ANALISIS PENGARUH KOMISARIS INDEPENDEN, KOMITE AUDIT, DAN
KUALITAS AUDIT TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (TAX
AVOIDANCE)**

(Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017)

Ditulis Dan Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Ujian Akhir Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata-1 Di Program Studi Akuntansi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha

SKRIPSI



Oleh :

Nama : Kustanti

Nomor Mahasiswa : 144214926

Jurusan : Akuntansi

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA

YOGYAKARTA

2018

LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kustanti

NIM : 144214926

Jurusan : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa judul skripsi “ Analisis Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)” benar-benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 13 Agustus 2018

Kustanti

HALAMAN PERSETUJUAN

Dipertahankan di Depan Panitia Penguji Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta dan Diterima Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Pada Tanggal :

15 Agustus 2018

Panitia Penguji

Ketua

Dra. Sulastiningsih, M.Si.

1. Anggota

Dra, Priyastiwi, M.Si, Akt.

2. Anggota

Drs. Achmad Tjahjono, MM,Akt.

Mengesahkan

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi

Widya Wiwaha Yogyakarta

Ketua

Drs. Muhammad Subkhan, MM

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS PENGARUH KOMISARIS INDEPENDEN, KOMITE AUDIT DAN
KUALITAS AUDIT TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (*TAX
AVOIDANCE*)**

(Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2015-2017)

Nama : Kustanti
Nomor Mahasiswa : 144214926
Jurusan : Akuntansi
Bidang Konsentrasi : Akuntansi Pajak

Yogyakarta, 15 Agustus 2018

Telah Disetujui dan Disahkan Oleh :

Dosen Pembimbing

Dra. Priyastiwati, M.Si. Ak. CA.

MOTTO

Ingatlah Allah saat hidup tak sesuai keinginanmu. Allah pasti punya jalan yang lebih baik untukmu.

Saat masalahmu terlalu berat untuk ditangani beristirahatlah dan hitung berkah yang sudah kau dapatkan.

Allah menjawab doamu dengan 3 cara. Pertama, langsung mengabulkannya. Kedua menundanya. Ketiga menggantinya dengan yang lebih baik.

Sabar bukan tentang berapa lama kau bisa menunggu. Melainkan tentang bagaimana perilakumu saat menunggu.

Karunia Allah yang paling lengkap adalah kehidupan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan. (*Ali Bin Abi Thalib*)

Ilmu pengetahuan itu bukanlah yang dihafal, melainkan yang memberi manfaat. (*Imam Syafi'i*)

Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. (*QS Al Baqarah 216*)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan nikmat yang luar biasa kepada saya
2. Kedua orangtua yang selalu memberikan cinta dan kasih sayang serta selalu memberikan doa dan semangat untuk keberhasilan
3. Ketiga saudara saya tersayang (Mas Tanto, Mbak Fitri, dan Mbak Kus) serta keluarga besar
4. Dra. Priyastivi M.Si,Ak,CA atas bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini
5. Sahabat dan semua teman-teman
6. Semua orang yang hadir dan memberikan banyak pengalaman

STIE Widya Niwaha
Jangan Plagiat

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang pengaruh variabel komisaris independen, komite audit dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan sampel sektor industri perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2015-2017. Jumlah perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 20 perusahaan dengan pengamatan selama 3 tahun dengan menggunakan purposive sampling. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik dan regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) sedangkan komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis haturkan ke hadirat Allah SWT yang telah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi. Selama proses penulisan dan penyelesaian ini, penulis banyak memperoleh bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dan dorongan yang tiada henti itu rasanya sulit bagi penulis untuk menyelesaikannya. Untuk itu dalam sebuah karya yang sederhana ini penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, berkah dan nikmat yang tiada henti.
2. Bapak Drs. Muhammad Subkhan, MM selaku ketua STIE Widya Wiwaha.
3. Ibu Khoirunisa Cahya Firdarini, SE, Msi selaku ketua jurusan STIE Widya Wiwaha.
4. Ibu Dra. Priyastiwi, M.Si, CA selaku dosen pembimbing dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas kesabaran dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
5. Semua dosen STIE Widya Wiwaha yang telah memberikan dan mrngajarkan bekal ilmu selama perkuliahan sehingga dapat menyusun skripsi ini,
6. Kedua orangtuaku (Bapak Tumijan dan Ibu Walinem) yang tercinta dan kusayangi yang selalu mendoakan dan meyemangati memotivasi agar segera menyelesaikan skripsi.
7. Kakak-kakakku mas Tanto, mbak Fitri, dan mbak Kus yang selalu menjadi penyemangatku untuk menyelesaikan skripsi serta keponakan-keponakanku Gian dan Attar yang selalu menghiburku.
8. Seluruh keluarga besar yang selalu mendoakan dan memberi semangat.

9. Sahabatku tersayang Daniyanti, Paryani, Dwi Lestari, dan Siti Munawaroh yang selalu membantuku dan selalu memberiku motivasi dan semangat. Kalian luar biasa. Terima kasih untuk semuanya.
 10. Teman-teman satu bimbingan mbak Santi dan Cecilia terima kasih buat semangatnya.
 11. Seluruh sahabat dan teman-teman jurusan akuntansi angkatan 2014 terima kasih kebersamaannya selama 4 tahun. Terima kasih perhatian dan kebaikannya. Sukses selalu untuk kita semua.
 12. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan doa, semangat dan dorongan sehingga skripsi ini bisa terselesaikan terima kasih, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.
- Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan yang dimiliki. Namun besar harapan skripsi ini bisa bermanfaat bagi pembaca

Yogyakarta, 7 Agustus 2018

Penulis

Kustanti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Pertanyaan Penelitian.....	9
1.3 Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS	
2.1 TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1.1 Teori Keagenan.....	12
2.2.1 Penghindaran Pajak.....	13
2.3.1 Komisaris Independen.....	14
2.3.2 Tugas Komisaris Independen.....	16
2.3.3 Wewenang Komisaris Independen.....	16
2.4.1 Komite Audit.....	19
2.5.1 Kualitas Audit.....	24

2.6 Penelitian Terdahulu.....	27
2.7 Pengembangan Hipotesis.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 VARIABEL PENELITIAN&PENGERTIAN OPERASIONAL VARIABEL.....	35
3.1.1 Komisararis Independen.....	36
3.1.2 Komite Audit.....	36
3.1.3 Kualitas Audit.....	37
3.2 METODE PENGUMPULAN DATA.....	38
3.2.1 Metode Analisis Data.....	38
3.2.2 Statistik Diskriptif.....	38
3.2.3 Uji Asumsi Klasik.....	39
3.2.3.1 Uji Normalitas.....	39
3.2.3.2 Uji Multikolinearitas.....	39
3.2.3.3 Uji Heteroskedastisitas.....	39
3.2.3.4 Uji Autokolerasi.....	40
3.2.4 Regresi Linier Berganda.....	41
3.2.5 Uji Adjusted R Square R^2	42
3.2.5.1 Uji Hipotesis.....	42
3.2.5.2 Uji t.....	42
3.2.5.3 Uji Statistif F (F-test).....	43
BAB IV PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian.....	44
4.1.1 Deskriptif Penelitian.....	44
4.1.2 Deskriptif Penelitian.....	47
4.1.3 Uji Asumsi Klasik.....	49
4.1.3.1 Uji Normalitas.....	49
4.1.3.2 Uji Multikolinearitas.....	50
4.1.3.3 Uji Heteroskedastisitas.....	51

4.1.3.4 Uji Autokolerasi.....	52
4.2 Regresi Linier Berganda.....	53
4.2.1 Uji Hipotesis (T-test).....	53
4.2.2 Uji Hipotesis F (Simultan).....	54
4.2.3 Uji Koefisien Determinasi R^2	55
4.2.4 Pembahasan.....	56
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan.....	58
5.2 Batasan Penelitian.....	59
5.3 Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60
LAMPIRAN.....	62

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Kriteria Perusahaan.....	45
Tabel 4.2 Data Perusahaan 2015.....	45
Tabel 4.3 Data Perusahaan 2016.....	46
Tabel 4.4 Data Perusahaan 2017.....	47
Tabel 4.5 Descriptif Statistik.....	48
Tabel 4.6.1 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test.....	49
Tabel 4.6.2 Multikolinieritas.....	50
Tabel 4.6.3 Model Summary.....	52
Tabel 4.7 Regresi Linier Berganda.....	52
Tabel 4.7.1 Annova.....	54
Tabel 4.7.2 Model Summary.....	56

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

DAFTAR GAMBAR

Tabel 4.1 Normality Probality Plot.....	49
Tabel 4.2 Scatterplot.....	51

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran i.....	62
Lampiran ii.....	63
Lampiran iii.....	64
Lampiran iv.....	65
Lampiran v.....	66
Lampiran vi.....	67
Lampiran vii.....	68
Lampiran viii.....	69

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan iuran dari rakyat yang berdasarkan undang-undang sehingga pajak bersifat memaksa. Pajak dikenakan terhadap orang pribadi atau badan oleh negara atau institusi yang fungsinya sama yaitu untuk membiayai pengeluaran negara, oleh karena itu pemerintah menaruh perhatian besar terhadap sektor pajak. Bagi masyarakat pajak merupakan beban karena pajak mengurangi penghasilan akan tetapi wajib pajak tidak mendapat imbalan langsung ketika membayar pajak. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat bahkan suatu badan melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak (*tax Avoidance*) diartikan sebagai kegiatan yang legal (misalnya meminimalkan beban pajak tanpa melawan ketentuan perpajakan).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah perusahaan berusaha mengurangi beban pajaknya dengan cara yang legal dan tidak bertentangan dengan undang-undangan pajak yang berlaku (Santoso dan Muid, 2014). Penghindaran pajak dapat dikatakan persoalan yang rumit dan unik karena pada satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan akan tetapi tidak diinginkan (Budiman dan Setiyono, 2012). Meskipun praktik *tax avoidance* ini mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak namun pemerintah tidak dapat melakukan penuntutan hukum karena penghindaran pajak yang dilakukan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Perusahaan melakukan penghindaran pajak dikarenakan pajak akan mengurangi laba bersih pendapatan perusahaan, sehingga perusahaan berusaha memaksimalkan laba dengan cara

meminimalkan nilai pajak sekecil-kecilnya. Manajemen pajak adalah salah satu hal yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam upaya penghindaran pajak melakukan dengan cara memanfaatkan kelemahan dalam undang-undang perpajakan yang berlaku. Manajemen pajak memerlukan pengawasan agar tindakan manajemen pajak tidak melakukan pelanggaran undang-undang. Pembentukan *corporate governance* dapat mengawasi kinerja pengelola perusahaan termasuk dalam hal perpajakan perusahaan. *Corporate governance* diwakili oleh kepemilikan independen, dewan komisaris, kualitas audit, dan komite audit (Ayu Nisa, 2010).

Komisaris independen adalah salah satu bagian dari *corporate governance* yang mempengaruhi penghindaran pajak. Komisaris independen adalah dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan dewan direksi atau dewan lainnya. Komisaris independen mempunyai kemampuan untuk bertindak secara independen untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Prakosa, (2014) menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen dapat mencegah terjadinya penghindaran pajak. Komisaris independen yang duduk dalam jajaran pengurus perseroan dianggap penting dalam kaitan implementasi GCG dalam perusahaan, karena memiliki peran untuk memberi nasihat dan melakukan pengawasan terhadap jalannya perusahaan (Sitorus, 2012:665). Keberadaan komisaris independen dalam suatu perusahaan dapat memiliki dampak positif pada kinerja perusahaan dan nilai perusahaan (Yang, 2011). Selain itu, komisaris independen juga memiliki tanggung jawab kepada kepentingan pemegang saham, sehingga komisaris independen akan memperjuangkan ketaatan pajak perusahaan dan dapat mencegah praktik *tax avoidance* (Hanto & Puspita, 2014). Proporsi komisaris independen yang besar dalam struktur dewan komisaris akan memberikan pengawasan

yang lebih baik dan dapat membatasi peluang-peluang kecurangan pihak manajemen (Raharjo dan Daljono, 2014). Adanya komisaris independen dalam perusahaan juga dapat memberikan petunjuk dan arahan untuk mengelola perusahaan serta merumuskan strategi perusahaan yang lebih baik termasuk dalam menentukan kebijakan terkait tarif pajak efektif yang akan dibayarkan perusahaan (Risti dan Agung, 2016). Jadi dapat disimpulkan adanya komisaris independen yang baik akan meminimalisir kecurangan dalam pelaporan perpajakan yang dilaporkan manajemen sehingga meningkatkan integritas nilai informasi keuangan yang disampaikan manajemen. Oleh karena itu semakin baik proporsi komisaris independen maka semakin menurun praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan (Risti dan Agung, 2016)

Komite audit yang sekurang-kurangnya beranggotakan tiga orang membantu tugas dewan komisaris dalam melakukan pengawasan, diantaranya adalah melakukan evaluasi atas perencanaan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka penilaian kecukupan proses keuangan (Fitri dan Tridahus, 2015). Dewan komisaris memberikan tanggung jawab kepada komite audit terhadap kesalahan pelaporan agar keuangan dapat dipercaya (*relevant* dan *reliable*) (Fitri dan Tridahus, 2015). Oleh karena itu, komite audit dapat memonitoring mekanisme yang dapat memperbaiki kualitas informasi bagi pemilik perusahaan atau *shareholder* dan manajemen perusahaan, karena kedua belah pihak tersebut memiliki *level* informasi yang berbeda (Linda, Lilis, dan Nuraini, 2011).

Keberadaan komite audit dalam suatu perusahaan berfungsi untuk membantu dewan komisaris dalam mengawasi pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan perusahaan (Guna dan Herawaty, 2010). Pada prinsipnya, tugas pokok dari komite audit

adalah membantu dewan komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan atas kinerja perusahaan. Komite audit berfungsi untuk memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan dan pengendalian intern (Fadhilah, 2014). Komite audit sesuai fungsinya membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan serta memberikan rekomendasi kepada manajemen dan dewan komisaris terhadap pengendalian yang telah berjalan sehingga dapat mencegah asimetri informasi (Rista dan Agung, 2016).

Tanggung jawab komite audit dalam *Corporate governance* (CG) adalah untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, melaksanakan usahanya dengan beretika, melaksanakan pengawasan secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan karyawan perusahaan. Semakin ketatnya pengawasan yang dilakukan pada suatu manajemen perusahaan maka akan menghasilkan suatu informasi yang berkualitas dan kinerja yang efektif (Hanum dan Zulaikha, 2013). Komite audit dengan wewenang yang dimilikinya akan dapat mencegah segala perilaku atau tindakan yang menyimpang terkait dengan laporan keuangan perusahaan. Sehingga dengan adanya komite audit dalam perusahaan dapat meminimalisir terjadinya praktik *tax avoidance* (Rista dan Agung, 2016).

Kualitas audit merupakan segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan (Dewi dan Jati, 2014). Dalam melakukan pengauditan sangat diperlukan transparansi yang merupakan salah satu unsur dari *corporate governance*. Transparansi terhadap pemegang saham dapat dicapai dengan melaporkan hal-hal terkait perpajakan pada pasar modal dan para pertemuan pemegang

saham. Peningkatan transparansi terhadap pemegang saham dalam hal pajak semakin dituntut oleh otoritas publik (Sartori, 2010). Asumsi adanya implikasi dari perilaku pajak yang *agresif*, perusahaan mereka mengambil posisi *agresif* dalam hal pajak dan akan mencegah tindakan tersebut jika mereka tahu sebelumnya. Pengaruh pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan reputasi terbaik terhadap praktik yang dilakukan manajemen perusahaan.

Perusahaan yang diaudit oleh KAP besar terbukti tidak melakukan penghindaran pajak, karena auditor yang termasuk dalam *The Big Four* lebih kompeten dan profesional dibanding dengan auditor yang termasuk *Non The Big Four*, sehingga ia memilih pengetahuan yang lebih banyak tentang cara mendeteksi dan memanipulasi laporan keuangan yang mungkin dilakukan oleh perusahaan (Asfiyati, 2012; dalam Dewi dan Jati, 2014). Jaya dkk. (2012) dalam penelitiannya menemukan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak tetapi moral etika-pajak lebih mempengaruhi intensi wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak, dan tidak melihat hasil audit laporan keuangan perusahaan sebagai pertimbangan dalam melakukan penghindaran pajak. Semakin tinggi moral-etika pajak maka semakin rendah niat wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak (Mahani, 2016). Dalam praktiknya KAP yang termasuk *The Big Four* memberikan penawaran jasa berupa konsultasi pajak, isu transfer pricing dll.. Empat besar auditor tersebut adalah Pricewaterhouse Coopers (PwC), Deloitte Touche Tohmatsu, Ernst & Young (EY), dan KPMG.

Terkait dalam kasus penghindaran pajak perusahaan yang dilakukan di Indonesia. Perusahaan besar batubara milik Grup Bakrie yakni PT. Kaltim Prima Coal (KPC), PT. Bumi Resources Tbk. Dan PT. Arutmin yang diduga terkait tindak pidana pajak tahun

2007. Tiga perusahaan yang berada di bawah kelompok bisnis disebut-sebut terlibat kasus dugaan tunggakan pajak yang dilakukan dengan bantuan Gayus Tambunan. Direktur Jenderal Pajak Mochamad Tjiptardjo mengungkapkan kurang bayar pajak dari tiga perusahaan milik Grup Bakrie masing-masing Rp 1,5 triliun untuk KPC, Rp 376 miliar untuk Bumi, dan US\$ 27,5 juta untuk Arutmin. Tunggakan itu merupakan nilai SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) pajak tahun 2008 lalu dan sebagian telah dilakukan pada bulan Mei 2010. Satu dari tiga perusahaan yakni KPC, perkara pajaknya bahkan sudah diputus oleh Mahkamah Agung dan menang. Tjiptardjo mengatakan penyidikan akan dihentikan apabila ada permintaan penghentian perkara dengan melunasi denda 400% dari tunggakan.

Pada persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Gayus mengungkapkan pengakuan atas dana yang diterima sebesar US\$ 3 juta dari Grup Bakrie untuk mengurus perkara pajak tiga perusahaan kelompok bisnis tersebut. Masing-masing untuk menyelesaikan surat banding ketetapan pajak untuk PT. Bumi Resources Tbk., surat ketetapan pajak untuk PT. Kaltim Prima Coal dan sunset policy atau pemutihan pajak PT. Arutmin. Gayus merinci untuk Kaltim Prima dia dibayar US\$ 500 ribu, Bumi US\$ 500 ribu dan Arutmin US\$ 2 juta. (www.beritasatu.com).

Dalam kasus di atas dapat dilihat bagaimana banyak pihak-pihak terkait dalam praktik penghindaran pajak. Suatu perusahaan tidak mampu menghindari beban pajak. Jika suatu perusahaan tidak melakukan kewajiban dalam membayar pajak maka kemungkinan besar perusahaan tersebut tidak akan memperoleh izin beroperasi atau bahkan persahaan akan ditutup oleh pemerintah. Tingginya tarif pajak yang juga menjadi faktor suatu perusahaan melakukan penghindaran pajak. Di samping itu terdapat faktor

lain suatu perusahaan melakukan penghindaran pajak yaitu faktor kepentingan dari perusahaan yang menginginkan laba yang besar tanpa adanya beban pajak yang tinggi. Maka dari itu penghindaran pajak mungkin tidak bisa dipungkiri lagi akan tetapi negara-negara mengecam penghindaran pajak tersebut karena penghindaran pajak sangat merugikan suatu negara. Catatan 2017 realisasi perpajakan dalam negeri mencapai 33,4% atau Rp 584,9 triliun dari target yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp 1,748 triliun (bisnis.tempo.com). Hal tersebut memaksa pemerintah untuk melakukan pemerangan terhadap praktik penghindaran pajak. Kebijakan perpajakan diperketat untuk mencegah penghindaran pajak ke luar negeri dengan membuat aturan baru dalam bidang perpajakan.

Jika penghindaran pajak terus berlangsung tanpa penanganan yang cepat maka suatu negara tidak akan tumbuh menjadi negara maju. Hampir semua biaya-biaya yang digunakan untuk membaangun negara adalah dari pajak masyarakat. Oleh karena itu pemerintah berusaha agar tidak terjadi kecurangan-kecurangan dalam pembayaran pajak yang dilakukan wajib pajak. Jika penghindaran pajak terus berlangsung maka akan sangat berdampak pada pengusaha kelas menengah. Beban pengumpulan pajak akan dialihkan ke pengusaha kelas menengah yang pendapatannya hanya rata-rata. Hal ini tentu saja tidak adil bagi pengusaha kelas menengah yang berusaha tertib pajak dengan jumlah pendapatan yang tidak besar sedangkan pengusaha besar berupaya dengan berbagai cara untuk menyembunyikan hartanya sehingga beban pajak yang harus dibayarkan tidak bernilai besar. Permasalahan ini menimbulkan orang yang kaya akan semakin kaya sedangkan orang yang miskin akan semakin miskin karena orang kaya tidak membayar pajak secara adil. Oleh karena itu persoalan penghindaran pajak harus segera ditangani agar kerugian yang dialami negara dapat segera teratasi. Penghindaran pajak terjadi

karena kurangnya transparansi laporan keuangan suatu perusahaan terhadap pemerintah. Tata kelola perusahaan menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan (Hanuman, 2008). Perusahaan yang tidak memenuhi standar tata kelola yang baik akan besar kemungkinan melakukan penghindaran pajak namun sebaliknya perusahaan yang memenuhi standar tata kelola yang baik maka kecil kemungkinan untuk melakukan penghindaran pajak.

Dari uraian di atas penelitian tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**ANALISIS PENGARUH KOMISARIS INDEPENDEN, KOMITE AUDIT, DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (TAX AVOIDANCE)**”. Peneliti ingin mengetahui tentang pengaruh komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2015 – 2017. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian yang sebelumnya menggunakan seluruh sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sedangkan penelitian saat ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2015– 2017.

1.2 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)?
2. Bagaimana pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)?

3. Bagaimana pengaruh kualitas audit terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)?
4. Bagaimana pengaruh komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).
2. Untuk menganalisis pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).
3. Untuk menganalisis pengaruh kualitas audit terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).
4. Untuk menganalisis pengaruh komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi, wawasan dan referensi di lingkungan akademis serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis/Empiris

Bagi Pemerintah

1. Diharapkan memberikan masukan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan di bidang perpajakan sehingga dapat meminimalisir aktivitas *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Bagi Penulis

1. Dapat menambah pengetahuan, gambaran dan pemahaman tentang komisaris independen, komite audit dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk memahami pentingnya melakukan pembayaran kewajiban pajak terhadap negara guna kelangsungan kemajuan suatu negara.

STIE Widya Widaha
Jangan Plagiat

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1 Tinjauan pustaka

2.1.1 Teori keagenan (*agency theory*)

Konsep teori keagenan menurut Anthony dan Govindarajan dalam Siagian (2011:10) adalah hubungan atau kontak antara *principal* dan *agent*. *Principal* memperkerjakan *agent* untuk melakukan tugas kepentingan *principal*, termasuk pendelegasian otorisasi pengambilan keputusan dari *principal* kepada *agent*. Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami hubungan antara manajer dan pemegang saham. Jensen dan Meckling dalam Siagian (2011:10) menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontak antara manajer (*agent*) dengan pemegang saham (*principal*).

Menurut Eisenhardt dalam Siagian (2011:10) menyatakan bahwa teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat dasar manusia yaitu :

1. Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*).
2. Manusia memiliki daya pikir terbatas tentang persepsi masa mendatang (*bounded rationality*).
3. Manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*).

Hubungan antara penghindaran pajak dengan teori keagenan adalah adanya konflik yang terjadi terhadap kepentingan laba perusahaan pemungut pajak dengan pembayar pajak (manajemen pajak). Pemungut pajak berharap adanya pemasukan

sebesar-besarnya dari pemungutan pajak, sementara dari pihak agen berpandangan bahwa perusahaan harus menghasilkan laba yang cukup signifikan dengan beban pajak yang rendah (Prakosa, 2014).

2.2.1 Penghindaran pajak

Penghindaran pajak adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang Pohan, (2013) dalam Sari dkk., (2016). Penghindaran ini dilakukan agar perusahaan memperoleh laba yang besar dengan beban pajak yang rendah. Guire at al (2010), mengatakan bahwa manfaat dari adanya *tax avoidance* adalah untuk memperbesar *tax saving* yang berpotensi mengurangi pembayaran pajak sehingga akan menaikkan *cash flow*.

Penghindaran pajak adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajak yang harus ditanggung dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan peraturan perundang-undangan (Ngadiman , dkk., 2014). Penghindaran pajak yang dilakukan tersebut masih dalam bingkai peraturan perpajakan yaitu memenuhi beban pajak minimum yang telah ditetapkan.

Penelitian ini dihitung melalui CASH ETR (*cash effective tax rate*) perusahaan yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak (Dyrenng, dkk.,2010 dalam Putri , dkk., 2014). Semakin besar nilai CASH ETR menunjukkan bahwa

semakin rendah tingkat penghindaran pajak suatu perusahaan dan sebaliknya semakin kecil nilai CASH ETR menunjukkan semakin besar tingkat penghindaran pajak.

Adapun cara perusahaan melakukan penghindaran pajak menurut Merks (2007) dalam Kurniasih dan Sari (2013) adalah sebagai berikut :

- a. Memindahkan subjek pajak atau objek pajak ke negara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (*tax haven country*) atas suatu jenis penghasilan (*substantive tax planning*).
- b. Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah (*formal tax planning*).
- c. Ketentuan anti *avoidance* atas transaksi *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping* dan *controlled foreign corporation* (*Specific Anti Avoidance Rule*), serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis (*General Anti Avoidance Rule*).

2.3.1 Komisaris Independen

Komisaris Independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan Direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Komisaris Independen adalah komisaris yang anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat atau dengan cara lain yang berhubungan

langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan yang mengawasi pengelolaan perusahaan. Pengertian komisaris independen sebenarnya berasal dari pengertian komisaris dalam pasal 1 angka 5 UU No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas menyatakan “*komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasehat kepada direksi dalam menjalankan perseroan.* Komisaris independen harus secara proaktif mengupayakan agar Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi yang terkait, namun tidak terbatas pada hal-hal berikut :

- a. Memastikan bahwa perusahaan memiliki strategi bisnis yang efektif, termasuk di dalamnya memantau jadwal, anggaran dan efektifitas strategi tersebut.
- b. Memastikan bahwa perusahaan mengangkat eksekutif dan manajer-manajer profesional.
- c. Memastikan bahwa perusahaan memiliki informasi, dan sistem audit yang bekerja dengan baik.
- d.
- e. Memastikan bahwa perusahaan mematuhi hukum dan perundangan yang berlaku maupun nilai-nilai yang ditetapkan perusahaan dalam menjalankam operasinya.
- f. Memastikan resiko dan potensi krisis selalu diidentifikasi dan dikelola dengan baik.
- g. Memastikan prinsip-prinsip dan praktek *Good Corporate Governance* dipatuhi dan diterapkan dengan baik.

2.3.2 Tugas Komisaris Independen

- a. Menjamin transparansi dan keterbukaan laporan keuangan perusahaan.
- b. Perlakuan yang adil terhadap pemegang saham minoritas dan *stakeholder* yang lain.
- c. Diungkapkannya transaksi yang mengandung benturan kepentingan secara adil dan wajar.
- d. Kepatuhan perusahaan pada perundangan dan peraturan yang berlaku.
- e. Menjamin akuntabilitas organ perseroan.

2.3.3 Wewenang Komisaris Independen

- a. Komisaris Independent mengetuai komite audit dan komite nominasi.
- b. Komisaris berdasarkan pertimbangan rasional dan kehati-hatian berhak menyampaikan pendapat yang berbeda dengan anggota dewan komisaris lainnya yang wajib dicatat dalam berita acara Rapat Dewan Komisaris dan pendapat yang berbeda yang bersifat material, wajib dimasukkan dalam laporan tahunan.

Dalam Komisaris Independen terdapat 2 kriteria persyaratan seseorang menduduki jabatan komisaris independen yaitu :

- a. Kriteria komisaris independen menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)* :
 1. Komisaris Independen bukan merupakan anggota manajemen.
 2. Komisaris Independen bukan merupakan pemegang saham mayoritas, atau seorang pejabat atau dengan cara lain yang berhubungan secara langsung atau

tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari pemegang perusahaan.

3. Komisaris Independen dalam kurung waktu 3 tahun terakhir tidak dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai eksekutif oleh perusahaan atau perusahaan lainnya dalam satu kelompok usaha dan tidak pula dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai komisaris setelah tidak lagi menempati posisinya seperti itu.
4. Komisaris Independen bukan merupakan penasehat profesional perusahaan atau perusahaan yang lainnya yang satu kelompok dengan perusahaan tersebut.
5. Komisaris Independen bukan merupakan pemasok atau pelanggan yang signifikan dan berpengaruh dari perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok, atau dengan cara lain berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemasok atau pelanggan tersebut.
6. Komisaris Independen tidak memiliki kontraktual dengan perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok selain sebagai komisaris perusahaan tersebut.
7. Komisaris Independen harus bebas dari kepentingan dan bisnis apapun atau hubungan lainnya yang dapat, atau secara wajar dapat dianggap sebagai campur tangan secara material dengan kemampuan sebagai seorang komisaris untuk bertindak demi kepentingan yang menguntungkan perusahaan. (diambil dari : kriteria otoritas bursa Efek Australia tentang *Outside Director*)

b. Kriteria komisaris independen menurut keputusan Direksi PT. aBursa Efek Jakarta Nomor Kep-305/BEJ/07-2004 Jakarta tanggal 19 Juli 2004 yaitu:

1. Jumlah minimal komisaris independen adalah 30% dari seluruh anggota Dewan komisaris.
2. Komisaris independen tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik.
3. Komisaris Independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan emiten atau pemegang saham mayoritas atau pemegang saham utama dari perusahaan tercatat yang bersangkutan.
4. Komisaris Independen tidak memiliki afiliasi dengan direktur dan atau komisaris lainnya dari perusahaan tercatat yang bersangkutan.
5. Komisaris Independen tidak memiliki kedudukan rangkap pada perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan tercatat yang bersangkutan atau hubungan usaha langsung dan tidak langsung yang berkaitan dengan usaha-usaha perusahaan tercatat.
6. Komisaris Independen harus berasal dari luar emiten atau perusahaan publik itu.
7. Komisaris Independen harus mengerti peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
8. Komisaris Independen diusulkan dan dipilih oleh pemegang saham minoritas yang bukan pemegang saham pengendali dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

2.4.1 Komite Audit

Komite Audit adalah organ tambahan yang diperlukan dalam pelaksanaan GCG. Komite audit ini dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam melaksanakan pengelolaan perusahaan serta melaksanakan tugas penting berkaitan dengan sistem pelaporan keuangan. Anggota komite audit diharuskan memiliki keahlian yang memadai. Komite audit ini memiliki kewenangan dan fasilitas untuk mengakses data perusahaan.

Komite audit dituntut untuk dapat bertindak secara independen. Independensi komite audit tidak dapat dipisahkan moralitas yang melandasi integritasnya. Hal ini perlu disadari karena komite audit merupakan pihak yang menjembatani antara eksternal auditor dan perusahaan yang juga sekaligus menjembatani antara fungsi pengawasan dewan komisaris dengan internal auditor.

Komite audit adalah suatu komite yang beranggotakan satu atau lebih anggota dewan komisaris. Anggota komisaris audit dapat berasal dari kalangan luar dengan berbagai keahlian, pengalaman dan kualitas lainnya yang dibutuhkan guna mencapai tujuan komite audit. Komite audit harus bebas dari pengaruh direksi, eksternal auditor dan hanya bertanggung jawab kepada dewan komisaris.

Syarat suatu komite audit

1. Komite audit bertanggung jawab kepada dewan komisaris.

2. Komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang komisaris independen dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota lainnya berasal dari luar emiten atau perusahaan publik.
3. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang memadai sesuai latar belakang pendidikannya serta mampu berkomunikasi dengan baik.
4. Salah seorang dari anggota komite audit memiliki latar belakang pendidikan keuangan dan akuntansi.
5. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.
6. Bukan merupakan orang dalam kantor Akuntan Publik yang memberikan jasa audit dan/atau non-audit pada emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan dalam 1 tahun terakhir sebelum diangkat oleh komisaris sebagaimana dimaksud dalam peraturan VIII.A.2 tentang Independensi Akuntan yang memberikan jasa audit di pasar modal.
7. Bukan merupakan karyawan kunci emiten atau perusahaan publik dalam 1 tahun terakhir sebelum diangkat komisaris.
8. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik. Dalam hal anggota komite audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum, maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepada pihak lain.
9. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten, komisaris, direktur, atau pemegang saham utama emiten.

10. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten.
11. Tidak merangkap sebagai anggota komite audit pada emiten atau perusahaan publik lain pada periode yang sama.
12. Sekretaris perusahaan harus bertindak sebagai sekretaris komite audit.

Kebutuhan komite audit disebabkan karena belum memadainya peran pengawasan dan berdasarkan kedudukan dan kekerabatan menyebabkan mekanisme *check and balance* terhadap direksi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Fungsi audit internal dan eksternal belum berjalan optimal mengingat secara struktural, auditor tersebut berada pada posisi yang sulit untuk bersikap independen dan objektif hal tersebut memunculkan tuntutan adanya auditor independen. Komite audit timbul untuk memenuhi tuntutan tersebut.

Komite audit mempunyai tanggung jawab pada tiga bidang, yaitu :

1. Laporan Keuangan (*Financial Reporting*)

Memastikan bahwa laporan yang dibuat manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi keuangan, hasil usaha, rencana dan komitmen perusahaan jangka panjang.

2. Tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*)

Memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku dan etika, melaksanakan pengawasan secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan.

3. Pengawasan perusahaan (*Corporate Control*)

Komite audit bertanggung jawab untuk pengawasan perusahaan termasuk di dalamnya hal-hal yang berpotensi mengandung risiko dan sistem pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal.

Selain itu, Kepmen BUMN No. Kep-103/2002 menegaskan bahwa komite audit:

1. Mandiri dalam pelaksanaan tugas dan pelaporan. Komite audit melaksanakan prinsip akuntabilitas (*accountability*) terkait dengan tugas.
2. Bertanggung jawab langsung kepada komisaris/dewan pengawas. Hal ini terkait dengan prinsip pertanggungjawaban (*responsibility*).

Tugas dan tanggung jawab komite audit adalah sebagai berikut :

1. Mendorong terbentuknya struktur pengawasan intern yang memadai.
2. Meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan. Prinsip transparansi (*transparency*).
3. Mempersiapkan surat uraian tugas dan tanggung jawab komite audit selama tahun buku yang sedang diperiksa eksternal audit.

Wewenang komite audit yaitu

- a. Menyelidiki semua aktivitas dalam batas ruang lingkup tugasnya.
- b. Mencari informasi yang relevan dari setiap karyawan.
- c. Mengusahkan saran hukum dan profesional lainnya independen apabila dipandang perlu.

- d. Mengundang kehadiran pihak luar dengan pengalaman sesuai, apabila dianggap perlu.

Dalam maemaksimalnkan peran dewan komisaris dalam menjalankan fungsinya, pedoman *Good Corporate Governance* yang dikeluarkan KOMNAS *Good Corporate Governance* Indonesia merekomendasikan kepada dewan komisaris untuk membentuk komite yang bertugas membantu dewan komisaris secara profesional. Komite yang dapat dibentuk dewan komisaris selain komite audit adalah :

1. Komite Nominasi

Menyusun kriteria seleksi dan prosedur nominasi bagi anggota dewan komisaris, direksi dan para eksekutif lainnya di dalam perseroan, membuat sistem penilaian dan memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota dewan komisaris dan direksi perseroan.

2. Komite Remunerasi

Menyusun sistem penggajian dan pemberian tunjangan serta rekomendasi tentang :

- a. Penilaian terhadap remunerasi
- b. Opsi yang diberikan, antara lain opsi atas saham
- c. Sistem pension
- d. Sistem kompensasi serta manfaat lainnya dalam hal pengurangan karyawan

3. Komite Asuransi

Melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang jenis dan jumlah asuransi yang ditutup oleh perseroan.

2.5.1 Kualitas Audit

Kualitas Audit merupakan karakteristik atau gambaran praktik hasil audit berdasarkan standar auditing dan standar pengendalian mutu yang menjadi ukuran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab profesi seorang auditor. Dalam Nataline (2007) disebutkan ada Sembilan elemen pengendalian kualitas yang harus diterapkan oleh kantor akuntan dalam mengadopsi kebijakan dan prosedur pengendalian kualitas untuk memberikan jaminan yang memadai agar sesuai dengan standar profesional di dalam melakukan audit, jasa akuntansi, dan jasa *review*. Sembilan elemen *review* tersebut adalah sebagai berikut :

1. Independensi

Seluruh auditor harus *independent* terhadap klien ketika melaksanakan tugas. Prosedur dan kebijakan yang digunakan adalah dengan mengkomunikasikan aturan mengenai independensi staf.

2. Penugasan Personel untuk melaksanakan perjanjian

Personel harus memiliki pelatih teknik dan profesionalisme yang dibutuhkan dalam penugasan. Prosedur dan kebijakan yang digunakan yaitu dengan mengangkat personel yang tepat dalam penugasan untuk melaksanakan perjanjian serta memberi kesempatan partner memberikan persetujuan penugasan.

3. Konsultasi

Jika diperlukan personel yang dapat mempunyai asisten dari orang yang memiliki keahlian, judgement, dan otoritas yang tepat. Prosedur dan kebijakan yang diterapkan adalah mengangkat individu sesuai dengan keahliannya.

4. Supervise

Pekerjaan pada semua tingkat harus disupervisi untuk meyakinkan telah sesuai dengan standar kualitas. Prosedur dan kebijakan yang digunakan adalah menetapkan prosedur-prosedur untuk me-review kertas kerja dan laporan serta menyediakan supervisi pekerjaan yang sedang dilaksanakan.

5. Pengangkatan

Karyawan baru harus memiliki karakter yang tepat untuk melaksanakan tugas secara lengkap. Prosedur dan kebijakan yang diterapkan adalah selalu menerapkan suatu program pengangkatan pegawai untuk mendapatkan karyawan pada level yang akan ditempati.

6. Pengembangan Profesi

Personel harus memiliki pengetahuan yang dibutuhkan untuk memenuhi tanggung jawab yang disepakati. Prosedur dan kebijakan yang diterapkan adalah menyediakan program peningkatan keahlian spesialisasi serta memberikan informasi pada personal tentang aturan profesional yang baru.

7. Promosi

Personel harus memenuhi kualifikasi untuk memenuhi tanggung jawab yang akan mereka terima di masa depan. Prosedur dan kebijakan yang diterapkan adalah menetapkan kualifikasi yang dibutuhkan untuk setiap tingkat pertanggungjawaban dalam kantor akuntan serta secara periodik membuat evaluasi terhadap personel.

8. Penerimaan dan kelangsungan kerjasama dengan klien

Kantor akuntan publik harus meminimalkan penerimaan penugasan sehubungan dengan klien yang memiliki manajemen dengan integritas kurang. Prosedur dan

kebijakan yang diterapkan adalah menetapkan kriteria dalam mengevaluasi klien baru serta me-review prosedur dalam kelangsungan kerjasama dengan klien.

9. Inspeksi

Kantor akuntan harus menentukan prosedur-prosedur yang berhubungan dengan elemen-elemen yang lain yang akan diterapkan secara efektif. Prosedur dan kebijakan yang diterapkan adalah mendefinisikan luas dan isi program inspeksi serta menyediakan laporan hasil inspeksi untuk tingkat yang tepat.

Kualitas Audit oleh Kane dan Velury (2005) dalam simanjuntak (2008), didefinisikan sebagai tingkat kemampuan kantor akuntan dalam memahami bisnis klien. Dalam kualitas audit terdapat beberapa audit yang harus dipenuhi :

1. Pengalaman melakukan audit (*client experiment*)
2. Memahami industri klien (*industry expertise*)
3. Responsive terhadap kebutuhan klien (*responsiveness*)
4. Taat pada standar umum (*technical competence*)
5. Independensi (*independence*)
6. Sikap hati-hati (*due care*)
7. Komitmen yang kuat terhadap kualitas audit (*quality commitment*)
8. Keterlibatan pimpinan KAP
9. Melakukan pekerjaan lapangan dengan tepat (*field work conduct*)
10. Keterlibatan komite audit
11. Standar etika yang tinggi (*ethical standart*)
12. Tidak mudah percaya

Auditor dituntut oleh pihak yang berkepentingan dengan perusahaan untuk memberikan pendapat tentang kewajaran pelaporan keuangan disajikan oleh manajemen perusahaan dan untuk menjalankan kewajibannya ada 3 komponen yang harus dimiliki auditor yaitu kompetensi (keahlian), independensi dan *due professional care*. Kendala auditor dalam menjalankan fungsinya adalah adanya perbedaan kepentingan antara manajemen perusahaan. Perbedaan tersebut adalah keinginan manajemen yang ingin operasi perusahaan atau kinerjanya tampak berhasil dengan melihat laba yang lebih tinggi.

2.6 Penelitian Terdahulu

Anisa dan Kurnia (2012) meneliti tentang “Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance*”. Hasil penelitian tersebut adalah tidak terpengaruh signifikan kepemilikan institusional, dan komposisi dewan komisaris independen terhadap tax avoidance, sedangkan komite audit dan kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Faisal Reza, (2012) “Pengaruh Dewan Komisaris dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak” peneliti ini ingin menguji pengaruh dewan komisaris yang diukur melalui jumlah rapat dewan komisaris, presentase kehadiran anggota dewan komisaris, dan ketua dewan komisaris, serta pengaruh komite audit yang diukur dari jumlah anggota komite audit, jumlah rapat komite audit, presentase kehadiran anggota komite audit, dan latar belakang keuangan dari anggota komite audit terhadap penghindaran pajak yang diukur melalui GAAP ETR dan Current ETR. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa rapat dan independensi ketua dewan komisaris tidak

berpengaruh terhadap penghindaran pajak, jumlah anggota komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak diukur melalui *Current ETR*, namun mempengaruhi GAAP ETR dimana semakin meningkatnya anggota komite audit maka penghindaran pajak juga meningkat. Jumlah rapat yang dilakukan tidak memberikan pengaruh terhadap *current ETR* dan juga GAAP ETR, sedangkan tingkat kehadiran anggota dalam rapat komite audit tidak mempengaruhi *current ETR*, namun mempengaruhi GAAP ETR dimana semakin tinggi tingkat kehadiran maka semakin tinggi juga kemungkinan terjadinya penghindaran pajak, dan juga latar belakang keuangan mempengaruhi *current ETR* dimana semakin banyak anggota komite audit yang memiliki latar belakang keuangan maka penghindaran pajak juga meningkat.

Yoli Oktafiani Sari, (2016) “Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak” penelitian ini menguji pengaruh Tata kelola Perusahaan terhadap penghindaran pajak. Penelitian diprosikan dengan kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Kualitas Audit, dan komite audit terhadap penghindaran pajak. Hasil dari penelitian ini bahwa kepemilikan institusional dan proporsi Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Kualitas Audit secara statistik mempunyai hubungan dengan penghindaran pajak dan komite audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Muhammad Oktovian, (2015), “Pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*” penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hasil pengujian penelitian ini bahwa secara parsial kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance* dengan signifikan sebesar 0,221. Dewan komisaris independen tidak memiliki

pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance* dengan signifikansi sebesar 0,201. Kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance* dengan signifikansi sebesar 0,109. Komite audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance* dengan signifikansi sebesar 0,023. Sedangkan secara simultan kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial dan komite audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* dengan signifikansi sebesar 0,000.

Hidayana, (2017) “Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance*” penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompensasi eksekutif, latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit, dan komisaris independen terhadap penghindaran pajak. Penghindaran pajak diukur menggunakan ETR. Hasil menunjukkan bahwa kompensasi eksekutif dan latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit berpengaruh positif secara signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

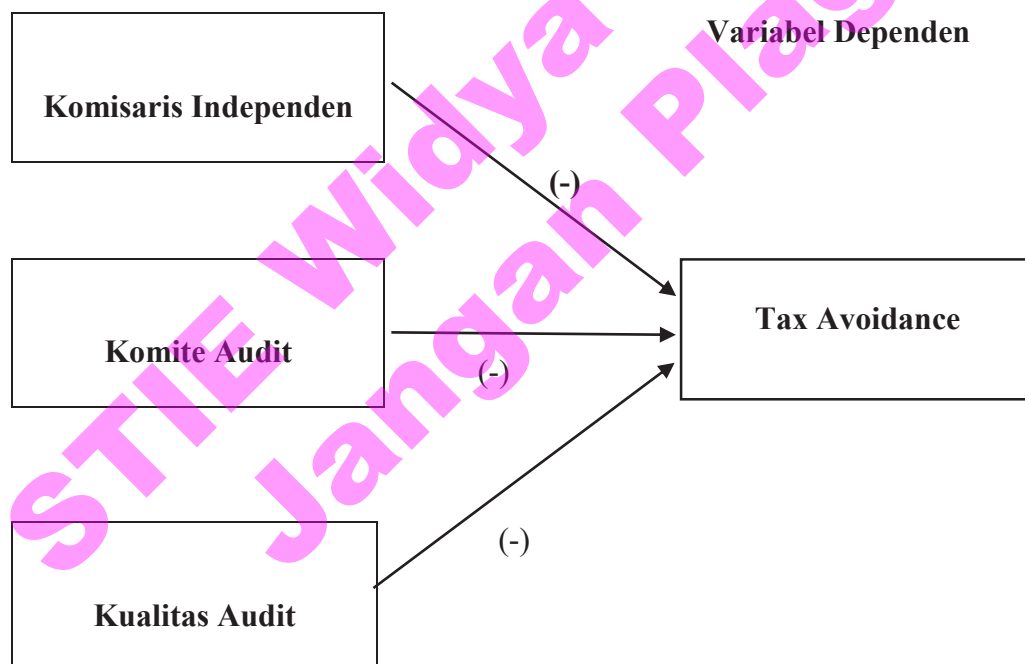
Ima Puspita Effendi, (2017) “Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit dan Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak” penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh dewan komisaris independen, komite audit dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan perbankan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dewan komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan kualitas audit berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Dalam uraian diatas dapat dibuat suatu kerangka pemikiran teoritis yang menggambarkan variabel-variabel yang mempengaruhi penghindaran pajak. Kerangka pemikiran dijelaskan pada gambar 1.1 sebagai berikut :

Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran

Variabel independen



2.7 Pengembangan Hipotesis

2.7.1 Pengaruh Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak

Komisaris independen merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain. Dalam hal ini komisaris tidak boleh melibatkan diri dalam tugas-tugas manajemen dan tidak boleh mewakili perusahaan dalam transaksi-transaksi pihak ketiga. Komisaris independen suatu perusahaan berperan sebagai pengawas dalam kinerja perusahaan. Komisaris Independen memastikan perusahaan mematuhi hukum dan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan operasinya sehingga komisaris independen akan memperjuangkan ketaatan pajak perusahaan dan dapat mencegah praktik penghindaran pajak. Semakin banyak perusahaan memiliki komisaris independen maka akan semakin kecil suatu perusahaan akan melakukan praktik *tax avoidance*. Penelitian Prakosa (2008) menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, jika komisaris independen mengalami peningkatan maka aktivitas penghindaran pajak akan mengalami penurunan. Jadi dapat disimpulkan adanya komisaris independen yang baik maka akan meminimalisir kecurangan dalam pelaporan perpajakan. Oleh karena itu semakin menurun baik komisaris independen dapat mencegah terjadinya aktivitas *tax avoidance*.

H1 : Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

2.7.2 Pengaruh Komite Audit terhadap *tax avoidance*

Komite audit merupakan salah satu bentuk nyata dari penerapan *good corporate governance* atau tata kelola yang baik. Banyak para pihak investor menganggap bahwa dengan adanya komite audit menjadi nilai lebih bagi sebuah perusahaan. Investor akan

merasa lebih aman jika berinvestasi terhadap perusahaan yang telah menerapkan GCG. Daniri (2006) dalam Pohan (2008) menyebutkan sejak direkomendasikan GCG di Bursa Efek Indonesia tahun 2000, komite audit telah menjadi komponen umum struktur *corporate governance* perusahaan publik. Penelitian Hanum dan Zulaikha (2013) menyatakan semakin ketatnya pengawasan yang dilakukan pada suatu manajemen perusahaan maka akan menghasilkan suatu informasi yang berkualitas dan kinerja yang efektif. Berdasarkan hal tersebut komite audit dapat mencegah adanya perilaku atau tindakan menyimpang terkait dengan laporan keuangan perusahaan. Penelitian Jati Dewi dan Jati (2014) menyatakan bahwa keberadaan komite audit memiliki pengaruh terhadap tax avoidance. Semakin tinggi keberadaan komite audit dalam suatu perusahaan akan meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan sehingga akan memperkecil kemungkinan terjadinya aktivitas tax avoidance. Penelitian Winata (2014) juga menyatakan komite audit berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance dengan menunjukkan semakin banyak komite audit yang ada dalam suatu perusahaan maka dapat meminimalisir aktivitas tax avoidance.

H2 : Komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

2.7.3 Pengaruh Kualitas Audit terhadap tax avoidance

Elemen terpenting dalam *corporate governance* adalah transparansi. Transparansi terhadap pemegang saham dapat dicapai dengan melaporkan hal-hal terkait perpajakan pada pasar modal dan pertemuan para pemegang saham. Laporan keuangan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* menurut beberapa referensi dipercaya lebih berkualitas sehingga menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya, oleh karena itu diduga perusahaan yang

diaudit oleh KAP *The Big Four* (*Price Waterhouse Cooper – Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, Ernst & Young-E&Y*) memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP *non The Big Four*. KAP *the big four* lebih memiliki pengalaman dan pengetahuan sehingga dapat menghasilkan informasi kualitas audit yang baik. Dengan adanya kualitas audit yang baik maka akan memaksa untuk menghindari adanya kecurangan dalam pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa suatu perusahaan yang memiliki kualitas yang tinggi maka dapat diyakini tidak melakukan penghindaran pajak. Hal ini dikuatkan oleh penelitian Tehupuring dan Rossa (2016) yang mengatakan kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

H3 : Kualitas Audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Pengertian Operasional Variabel

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Obyek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2017. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data dalam bentuk angka-angka atau data kualitatif yang diangkakan (Sugiyono, 2010;12). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *tax avoidance*, yang diukur *cash effective tax rate* (CETR). CETR merupakan pembayaran pajak secara kas atas laba perusahaan sebelum pajak penghasilan. CETR yang diharapkan mampu mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak perusahaan yang dilakukan menggunakan perbedaan tetap maupun perbedaan temporer (Chen et al, 2010). CETR merupakan perbandingan *Cash Tax Paid* dan *Pre-Tax Income*.

Pajak yang dibayar tunai

CETR = $\frac{\text{Pajak yang dibayar tunai}}{\text{Laba sebelum pajak}}$

Laba sebelum pajak

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2012). Variabel penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

3.1.1 Komisaris independen

Proksi komisaris independen (X1) diukur menggunakan presentase jumlah komisaris independen terhadap jumlah total komisaris (Khan, 2010). Berdasarkan peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI) Nomor Kep /BEJ/07-2004 setiap perusahaan independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota komisaris berarti telah memenuhi pedoman *corporate governance*.

Pengukuran ini dilakukan oleh Sandy dan Lukviarman (2015), dan Kurniasih dan Sari (2013). Berikut pengukuran proporsi dewan independen:

$$\text{Proporsi dewan komisaris independen} = \frac{\text{Jumlah komisaris independen}}{\text{Jumlah seluruh dewan komisaris}} \times 100\%$$

3.1.2 Komite Audit

Proksi komite audit (X2) diukur dari jumlah komite audit dalam suatu perusahaan (Hanun & Zulaika, 2013). Komite audit sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh BAPEPAM dan Kementerian BUMN mewajibkan komite audit minimal terdiri dari seorang ketua yang juga komisaris independen dan dua anggota eksternal yang independen. Menurut pengukuran Sandy & Lukviarman (2015) adalah sebagai berikut:

$$\text{Komite Audit} = \Sigma \text{Anggota komite audit pada suatu perusahaan}$$

3.1.3 Kualitas Audit

Proksi kualitas audit (X3) dapat diukur dengan menggunakan variabel dummy, jika perusahaan diaudit oleh KAP *The Big Four* yaitu *Price WaterhouseCooper-PWC*, *Deloitte Touche Tohmatsu*, KPMG, Ernst & Young-E&Y akan diberi skor 1, dan apabila tidak diaudit oleh Keempat Kantor Akuntan Publik (KAP) di bawah lisensi KAP *The Big Four* akan diberi Skor 0 (Andriyani, 2008).

Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor industri dasar & kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2014-2017. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Kriteria penentuan jumlah sampel yang akan digunakan sebagai penelitian adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan dengan data yang lengkap atau perusahaan yang dimaksud melakukan aktivitas ekonomi dan data keuangan secara lengkap periode 2015-2017.
2. Perusahaan yang menggunakan mata uang rupiah, agar kriteria pengukuran nilai mata uangnya sama.
3. Menyediakan informasi yang lengkap mengenai variabel-variabel yang diukur.
4. Perusahaan dengan nilai laba yang positif atau tidak mengalami rugi periode 2015-2017.
5. Memiliki *Tax income* yang positif periode 2015-2017.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik observasi dokumentasi dengan melihat laporan keuangan seluruh perusahaan manufaktur sektor industri dasar & kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 2015-2017 yang dipublikasikan oleh perusahaan melalui situs resmi www.idx.co.id kemudian mengakses laporan keuangan tahunnya dan mengumpulkan data-data yang diperlukan.

3.2.1 Metode Analisis Data

Analisa data yaitu mengelompokan data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan (Sugiyono, 2012). Analisis data yang digunakan meliputi statistik deskriptif, uji asumsi klasik, regresi linier berganda dan uji hipotesis. Semua pengujian pada peneliti ini menggunakan software SPSS.

3.2.2 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif menjelaskan nilai *minimum*, *maximum*, *mean*, dan *deviasi standar* dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran mengenai komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar & kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2017.

3.2.3 Uji Asumsi klasik

3.2.3.1 Uji Normalitas

Menurut Ghazali (2012) uji normalitas dapat dilihat dalam *probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal. Data dapat dikatakan normal jika data atau titik-titik tersebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal.

3.2.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel independen (Ghozali, (2012). Jika variabel independen saling berkolerasi, maka variabel-variabel ini tidak *orthogonal* (nilai kolerasi antar variabel independennya sama dengan nol). Pengujian ini dengan melihat *tolerance variance inflation factor* (VIF). Jika nilai *tolerance* $> 0,10$ dan $VIF < 10$, maka menunjukkan tidak adanya multikolinearitas. Sebaliknya jika *tolerance* $< 0,10$ dan > 10 dapat diartikan terjadinya multikolinearitas (Ghozali, 2012).

3.2.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mendeteksi apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali,2012). Jika varian dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap maka disebut homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Pendeteksian heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan analisis grafik dengan melihat ada tidaknya pada grafik *scatterplot model* yaitu melalui diagram pencar antara nilai yang diprediksi (*ZPRED*) dan *studentized residual* (*SRESID*).

3.2.3.4 Uji Autokolerasi

Uji Autokolerasi digunakan untuk melihat apakah terjadi kolerasi antara suatu periode t dengan periode sebelumnya ($t-1$). Secara sederhana bahwa analisis regresi adalah untuk melihat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat, jadi tidak boleh ada kolerasi antara observasi dengan data observasi sebelumnya. Beberapa uji statistik yang sering digunakan adalah Durbin Watson dengan ketentuan sebagai berikut H_0 : tidak ada autokolerasi, H_1 : ada autokolerasi.

Deteksi Autokolerasi Positif

Jika $d < d_L$ maka terdapat autokolerasi positif

Jika $d > d_U$ maka tidak terdapat autokolerasi positif

Jika $d_L < d < d_U$ maka pengujian tidak meyakinkan atau tidak ada kesimpulan yang pasti.

Deteksi Autokolerasi Negatif

Jika $(4 - d) < d_L$ maka terdapat autokolerasi negative

Jika $(4 - d) > d_U$ maka tidak terdapat autokolerasi negative

Jika $d_L < (4 - d) < d_U$ maka pengujian tidak meyakinkan atau tidak ada kesimpulan yang pasti

Run Test sebagai bagian dari statistik non parametric dapat digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat kolerasi yang tinggi atau tidak. Jika antar residual tidak terdapat hubungan kolerasi maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau random. Run tes digunakan untuk melihat apakah residual terjadi secara random atau tidak.

3.2.4 Regresi linier berganda

Analisa regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel dependen mengalami kenaikan atau penurunan. Dalam penelitian ini analisis regresi berganda digunakan untuk memprediksikan hubungan antara komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Adapun persamaan untuk menguji hipotesis secara keseluruhan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Y = CETR

X₁ = Komisaris independen

X₂ = Komite Audit

X₃ = Kualitas Audit

α = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi

e = Error Term

3.2.5 Uji Adjusted R Square (R²)

Ketepatan pemikiran model (*Goodness of Fit*) atau sering disebut Koefisien Determinasi (R²) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu dimana nilai R² yang semakin besar atau semakin mendekati satu menunjukkan hasil regresi yang semakin baik. Hal ini berarti variabel-variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat.

3.2.5.1 Uji Hipotesis

3.2.5.2 Uji t

Uji hipotesis dilakukan melalui uji t dengan cara membandingkan antara t hitung dengan t tabel dari koefisien regresi tiap variabel independen. Uji t bertujuan untuk mengetahui apakah koefisien regresi dari tiap variabel independen memiliki pengaruh yang berarti terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai probabilitas signifikan (Sig). T yang dibandingkan dengan batas signifikan yang ditetapkan yaitu sebesar 0,05. Jika nilai probabilitas signifikan < 0,05 maka secara parsial masing-masing variabel terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

3.2.5.3 Uji Statistif F (F-test)

Uji statistif atau sering juga disebut uji F bertujuan untuk melihat pengaruh variabel-variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Pengujian ini

dilakukan dengan melihat nilai probabilitas signifikan (Sig). F yang dibandingkan dengan batas signifikan yang ditetapkan yaitu sebesar 0,05. Jika nilai probabilitas signifikan < 0,05 maka secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika nilai probabilitas signifikan > 0,05 maka secara simultan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat (Ghozali, 2012).

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Deskriptif Penelitian

Deskriptif hasil penelitian digunakan untuk mendiskripsikan masing-masing variabel penelitian yang sesuai dengan penjelasan pada bab sebelumnya, diketahui bahwa variabel independen yang digunakan adalah variabel komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit. Sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang diukur dengan cara pajak dibayar tunai dibagi dengan laba sebelum pajak. Variabel komisaris independen dinilai dengan presentase jumlah komisaris independen dengan seluruh dewan komisaris. Komite audit diproksikan dengan jumlah anggota komite audit. Kualitas audit diukur menggunakan variabel dummy dimana jika perusahaan menggunakan jasa audit KAP *Big Four* yaitu *Price Waterhouse Cooper, Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG dan Ernst & Young* maka akan mendapat skor nilai 1 sedangkan jika tidak menggunakan jasa selain KAP *Big Four* akan mendapat skor nilai 0.

Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada periode 2015-2017. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah purposive sampling. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka diperoleh jumlah sampel sebanyak 20 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2017 dengan jumlah observasi sebanyak 60.

Kriteria yang ditentukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Data Tabel 4.1

Kriteria Perusahaan

Kriteria Perusahaan	Jumlah
Perusahaan dengan data lengkap atau data yang dimaksud adalah perusahaan yang melakukan aktivitas ekonomi dan data keuangan selama 2015-2017.	69
Perusahaan yang menggunakan nilai mata uang rupiah agar pengukuran nilai mata uang sama.	(12)
Menyediakan informasi lengkap serta memiliki variabel yang diperlukan untuk penelitian.	(27)
Perusahaan dengan nilai laba yang positif atau tidak mengalami kerugian selama 2015-2017	(10)
Jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria	20
Rentang waktu penelitian 3 tahun	60

Perusahaan yang akan diteliti menurut karakteristik yang memenuhi adalah 60 perusahaan manufaktur. Dari hasil analisis laporan keuangan perusahaan maka peneliti telah memperoleh data-data yang dibutuhkan seperti tabel di bawah ini :

Data Tabel 4.2

Data Perusahaan Tahun 2015

Kode Perusahaan	Penghindaran Pajak	Komisaris Independen	Komite Audit	Kualitas Audit
ALDO	2	33	3	0
KDSI	28	40	3	0
CPIN	20	33	5	1
JPFA	69	50	1	0
IMPC	25	50	3	0
TALF	13	33	3	0
TRST	65	50	3	1
DPNS	65	33	3	0
EKAD	9	50	3	0
INCI	10	25	0	0
SRSN	13	38	3	0
INAI	54	50	3	0
LION	28	33	3	0

LMSH	65	33	3	0
AMFG	4	33	4	1
ARNA	1	33	4	1
INTP	1	29	3	1
SMBR	0	20	3	0
SMGR	7	29	5	1
WTON	44	33	3	0

Sumber : Bursa Efek Indonesia

Data Tabel 4.3

Data Perusahaan Tahun 2016

Kode Perusahaan	Penghindaran Pajak	Komisaris Independen	Komite Audit	Kualitas Audit
ALDO	3	33	3	0
KDSI	41	40	3	0
CPIN	2	50	5	1
JPFA	99	60	0	0
IMPC	15	33	3	0
TALF	19	33	3	0
TRST	61	50	3	1
DPNS	66	33	3	0
EKAD	0	50	3	0
INCI	3	25	0	0
SRSN	819	38	3	0
INAI	79	50	3	0
LION	37	33	3	0
LMSH	13	33	3	0
AMFG	20	33	3	1
ARNA	2	33	4	1
INTP	0	29	3	1
SMBR	11	60	3	0
SMGR	12	29	4	1
WTON	36	33	3	0

Sumber : Bursa Efek Indonesia

Data Tabel 4.4

Data Perusahaan Tahun 2017

Kode Perusahaan	Penghindaran Pajak	Komisaris Audit	Komite audit	Kualitas audit
ALDO	6	33	3	0
KDSI	28	60	3	0

CPIN	0	33	5	1
JPFA	0	50	3	1
IMPC	22	50	3	0
TALF	8	33	3	0
TRST	260	33	3	1
DPNS	111	33	3	0
EKAD	2	50	3	0
INCI	3	25	3	0
SRSN	27	28	3	0
INAI	79	50	3	0
LION	121	33	3	0
LMSH	14	33	3	0
AMFG	70	33	3	1
ARNA	0	50	4	1
INTP	0	43	3	1
SMBR	2	20	3	0
SMGR	41	29	4	1
WTON	40	43	3	0

Sumber : Bursa Efek Indonesia

4.1.2 Deskriptif Ststistik

Statistik deskriptif menjelaskan besar nilai minimum, maximum, mean dan deviasi standar dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini merupakan gambaran mengenai komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Data Tabel 4.5

Descriptive Statistik

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penghindaran_pajak	60	-2.00	3.00	3.00	1.02511
Komisaris_independen	60	20.00	60.00	60.00	9.994357
Komite_audit	60	.00	5.00	5.00	0.94645
Kualitas_audit	60	.00	1.00	1.00	0.44595
Valid N (listwise)	60				

Sumber : olah SPSS

4.1.3 Uji Asumsi Klasik

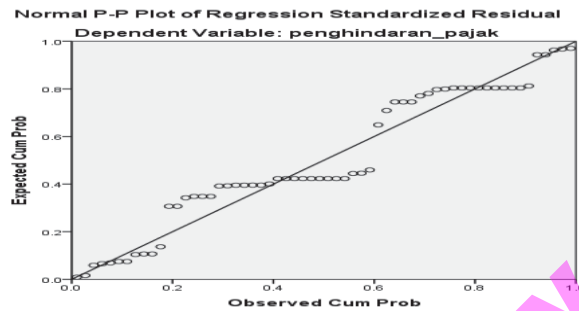
Uji ini digunakan untuk menguji, apakah model regresi yang digunakan untuk memastikan dalam penelitian ini layak uji atau tidak, Uji asumsi klasik digunakan untuk memastikan bahwa normalitas, autokolerasi, heteroskedastisitas, dan multikolinearitas tidak terdapat dalam model yang digunakan dan data yang dihasilkan terdistribusi normal.

Uji asumsi klasik dapat dijabarkan sebagai berikut : **4.1.3.1 Uji Normalitas**

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah data yang diteliti terdistribusi normal atau tidak yang dilakukan menggunakan analisis regresi linear. Model regresi yang baik adalah jika distribusi data masing-masing variabelnya normal atau mendekati normal. Uji normalitas dapat dilihat dalam normal *probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal.

Data Gambar 4.1

Normality Probability Plot



Sumber : Olah SPSS

Dari normal P-P dapat dilihat bahwa titik variabel berada disekitar garis diagonal serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal, hal ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal.

Data Tabel 4.6.1

One-sample Kolmogorov-smirnov test

		Unstandardized
N		60
Normal Parameter χ^2 .b	Mean	0E-7
	Std. Deviation	.92816105
Most Extreme Difference	Absolute	.142
	Positive	.142
	Negative	-.122
Kolmogorov-smirnov Z		1.098
Asymp. Sig. (2-tailed)		.179

a. Test distribution is normal

sumber : Olah SPSS

b. Calculated from data

Dari tabel *Kolmogorov smirnov* diatas nilai Asymp. Sig. (2-tailed) adalah 0,179 yang berarti bahwa data tersebut memiliki nilai Asymp. Sig. (2-tailed) $> 0,05$ atau $0,179 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal.

4.1.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah terdapat interkolerasi sempurna antara variabel-variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini. Uji dilakukan dengan *tolerance value* dan *variance inflation faktor* (VIF). Agar tidak terjadi multikolinearitas pada penelitian ini maka batas *tolerance value* $> 0,10$ dan $VIF < 10$. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada hasil output SPSS di bawah ini :

Data Tabel 4.6.2
Multikoliniearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Komisaris_independen 1	.991	1.009
Komite_audit	.754	1.327
Kualitas_audit	.759	1.318

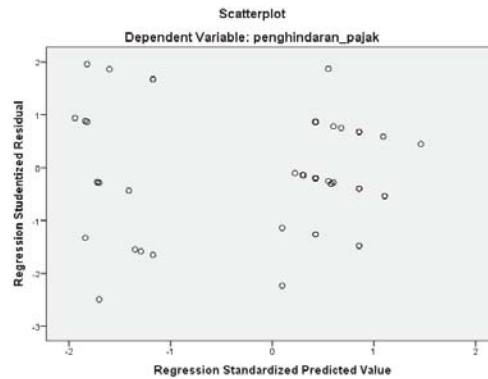
a. Dependent Variabel: penghindaran_pajak *sumber : Olah SPSS*

Dari hasil diatas *tolerance value* $> 0,10$ dan $VIF < 10$, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas pada seluruh variabel independen.

4.1.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan *varian* dan residual satu pengamatan ke pengamatan lain dalam model regresi. Dalam penelitian ini digunakan diagram titik (*scatterplot*) yang seharusnya titik-titik tersebut menyebar acak agar tidak terdapat heteroskedastisitas. Berikut hasil output uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini :

Data Gambar 4.2



sumber : Olah SPSS

Dari hasil tersebut dapat dilihat grafik *scatterplot* terlihat titik-titik menyebar secara acak, serta tersebar baik ke atas maupun ke bawah maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada model yang digunakan.

4.1.3.4 Uji Autokolerasi

Tabel Durbin Watson adalah tabel pembanding dalam uji autokolerasi. Uji Durbin Watson adalah sebuah test yang digunakan untuk mendeteksi terjadinya autokolerasi pada nilai residual (*prediction errors*) dari sebuah analisis regresi. Yang dimaksud dengan autokolerasi adalah hubungan antara nilai-nilai yang dipisahkan satu sama lain dengan jeda waktu tertentu.

Syarat dalam uji dalam uji autokolerasi adalah sebagai berikut :

Jika $dW < dL$ maka terdapat autokolerasi positif

Jika $dW > dU$ maka tidak terdapat autokolerasi positif

Jika $dL < d < dU$ maka pengujian tidak meyakinkan atau tidak dapat disimpulkan

Berikut hasil dari output spss dapat dilihat tabel di bawah ini :

Data Tabel 4.6.3

Model summary

Model	Durbin-Watson
1	1.725

- a. Predictors: (constant), komisariss_independen, komite_audit, kualitas_audit
- b. Dependent Variabel : penghindaran_pajak

Dari tabel di atas maka diperoleh nilai dW sebesar 1,725 dan dalam t tabel dU sebesar 1,688, sehingga dapat disimpulkan $dW > dU$ atau $1,725 > 1,688$. Dari hasil tersebut maka dalam penelitian ini tidak terdapat autokolerasi positif maupun negative, jadi dapat dikatakan penelitian ini terbebas dari autokolerasi.

4.2 Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Dari hasil pengujian yang dilakukan dapat dilakukan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Data Tabel 4.7

Regresi linear berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constants)	.978	.676		1.446	.154
Komisaris_independen	.011	.013	.106	.876	.385
Komite_audit	-.052	.151	-.048	-.342	.734
Kualitas_audit	-.882	.319	-.384	-2.763	.008

- a. Dependent Variabel : penghindaran_pajak *sumber : olah SPSS*

4.2.1 Uji Hipotesis (t-test)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh komisariss_independen, komite_audit, dan kualitas_audit terhadap penghindaran_pajak (*tax avoidance*)

dengan menganggap variabel independen yang lain konstan. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi t yang ditunjukkan oleh sig dari t . Tingkat signifikan yang diambil dalam hal ini 0,05. Jika nilai $t < 0,05$ maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah komisaris independen berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak. Dari hasil penelitian koefisien regresi untuk komisaris independen dengan nilai signifikan sebesar 0,385 atau lebih besar dari 0,05, maka hipotesis yang diajukan ditolak.

Komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah komite audit berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak. Dari hasil penelitian koefisien regresi untuk komite audit dengan nilai signifikan sebesar 0,734 atau lebih besar dari 0,05 maka hipotesis yang diajukan ditolak.

Kualitas Audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah kualitas audit berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak. Dari hasil penelitian ini diperoleh koefisien regresi untuk variabel kualitas audit dengan nilai signifikan sebesar 0,008 atau lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian diterima. Hal ini membuktikan bahwa kualitas audit berperan penting dalam ada atau tidaknya praktik penghindaran pajak. Perusahaan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* maka akan lebih sulit untuk melakukan kecurangan dalam pelaporan keuangan perusahaan. Jadi perusahaan yang

memiliki kualitas audit yang tinggi dapat dipastikan akan lebih transparan dalam penyampaian laporan keuangan. Sehingga perusahaan tidak akan melakukan praktik penghindaran pajak.

4.2.2 Uji Hipotesis F (Simultan)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh antara komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) secara bersama-sama (simultan). Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai probabilitas signifikan (Sig.) F yang dibandingkan dengan batas signifikan yang ditetapkan yaitu sebesar 0,05. Jika nilai probabilitas signifikan $< 0,05$ maka secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika probabilitas signifikan $> 0,05$ maka secara simultan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Adapun hasil uji anova pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

Data Tabel 4.7.1

Annova

Model	Sum of square	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	11.173	3	3.724	4.103	.011 ^b
Residual	50.827	56	.908		
Total	62.000	59			

- a. Dependent Variabel : penghindaran_pajak *sumber: olah SPSS*
b. Predictors: (Constant), kualitas_audit, komisaris_independen, komite_audit

Berdasarkan data di atas maka diketahui variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal tersebut dapat dibuktikan dari nilai tingkat signifikan sebesar $0.011 < 0,05$ maka terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas dan terikat.

4.2.3 Uji Koefisien Determinasi R²

Koefisien determinasi (R²) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen terbatas. Sebaliknya nilai R² yang mendekati satu menandakan variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan oleh variabel dependen. Nilai yang digunakan adalah adjusted R² karena variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini lebih dari dua. Adapun nilai adjusted R² dari perhitungan menggunakan SPSS dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Data Tabel 4.7.2

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted square	Std. Error of the Estimate
1	.425 ²	.180	.136	.95270

- a. Predictors :
(constant), kualitas_audit, komisariss_independen, komite_audit
- b. Dependent Variabel : penghindaran_pajak

Dari tabel tersebut nilai *adjusted R Square* sebesar 0.136. Hal ini menunjukkan bahwa variabel komisariss independen, komite audit, dan kualitas audit hanya dapat menjelaskan 13,6 persen variasi penghindaran pajak, sedangkan sisanya yaitu 86,4 persen (100 – 13,6) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

4.2.4 Pembahasan

Pengaruh Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal ini dibuktikan dengan uji t hasil dari signifikan komisaris independen sebesar 0,385 dimana nilainya lebih besar dari 0,05. Hasil penelitian ini menemukan bukti bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal ini sejalan dengan penelitian dari Anisa dan Kurnia (2012) yang menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan penelitian yang diperoleh, komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini dibuktikan dengan uji t dimana nilai komite audit sebesar 0,734 lebih besar dari nilai 0,05. Penelitian ini membuktikan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sejalan dengan penelitian dari Faizal Reza (2012) dimana dalam penelitiannya komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini dibuktikan dengan uji t dimana nilai kualitas audit sebesar 0,008 lebih kecil dari 0,05. Penelitian ini membuktikan bahwa kualitas audit berpengaruh

terhadap penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Yoli Oktafiani Sari (2016) yang menyatakan secara statistik kualitas audit mempunyai hubungan terhadap penghindaran pajak sehingga berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang diaudit oleh KAP *big four* memiliki kualitas audit yang lebih tinggi dibanding KAP lain saat melakukan proses audit. Artinya KAP besar mampu memberikan kualitas yang tinggi sehingga dapat mengurangi praktik penghindaran pajak.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian Analisis Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak maka diperoleh kesimpulan berikut ini :

1. Variabel komisaris independen secara parsial tidak berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal ini dikarenakan pemegang saham mayoritas memegang peranan penting terhadap keputusan kebijakan perusahaan yang akan diambil. Sehingga pengawasan komisaris independen dalam perusahaan untuk mematuhi peraturan dan hukum belum berjalan *efektif*.

2. Variabel komite audit secara parsial tidak berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Sehingga perubahan penambahan anggota komite audit hanya untuk memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh BAPEPAM.

3. Variabel kualitas audit secara parsial berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak. Hal ini karena perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big Four* sangat mengutamakan independen dan lebih transparan sehingga sangat sulit perusahaan untuk melakukan kecurangan.

4. Variabel komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit secara simultan berpengaruh signifikan. Hasil ini mengindikasikan bahwa variabel komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit berperan penting dalam pengambilan keputusan manajemen perusahaan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

1. Peneliti menggunakan pengukuran penghindaran pajak hanya menggunakan CETR.
2. Penelitian variabel independen hanya dapat menjelaskan 13,6 persen sehingga masih banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak.

5.3 Saran

1. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menggunakan sampel dengan rentang waktu yang lebih panjang.
2. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel independen yang lain agar bisa lebih bisa diketahui apa saja yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak itu meningkat atau tidak, misalnya peneliti menambah variabel kepemilikan institusional, ROI, Leverage dll.
3. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan pengukuran lain sebagai proksi penghindaran pajak. Seperti GAAP ETR, *book tax* dll.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, Gusti. 2011. Good Corporate Governance Indonesia.
<http://gustiphd.blogspot.co.id/2011/10/komisaris-independen-dan-gcg.html>
diakses 8 April 2018
- Amri, Nur Fadhilah. 2016. *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak). <https://www.e-akuntansi.com/2015/09/tax-avoidance-penghindaran-pajak.html> diakses 29 Maret 2018
- Eksandy, Arry (2017) Pengaruh komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Tangerang.
- Forum for Corporate Governance in Indonesia 2001*. Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam pelaksanaan *Corporate Governance* (Tata Kelola Perusahaan) Edisi ke-2 (Jakarta: FCGI), hlm. 7.
- Forum for Corporate Governance in Indonesia* dan YPPMI Institute, Op.cit., hlm.151-156.
- Hidayana, (2017). Pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2013-2015. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas. Lampung Bandar Lampung.
- Kurniasih, Tommy, Sari Maria M. Ratna 2013. Pengaruh *Return On Assets, Leverage, Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada *Tax Avoidance*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Maharani, Dyah Putri (2015). Pengaruh Kualitas Auditor Eksternal Dan Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*. Skripsi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Maharani, I Gusti Ayu Cahya, & Suardana, Ketut Alit. (2014).Pengaruh *Corporate Governance, Profitabilitas*, dan Karakteristik Eksekutif pada *Tax Avoidance* Perusahaan Manufaktur. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol.9,No.2,pp.525-539.
- Oktafiani Sari, Yoli (2016). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. Universitas Andalas. Padang.
- Pengertian Penghindaran pajak. https://id.wikipedia.org/wiki/Penghindaran_pajak
diakses 29 Maret 2018
- Pohan, HT 2008. Pengaruh *Good Corporate Governance, Rasio Tobin's q*, Perataan Laba Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Publik. <http://hotmanpohan.blogspot.com>.

Reza, Faisal (2012). Pengaruh Dewan Komisaris dan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak. Skripsi Fakultas Ekonomi Program Ekstensi Akuntansi. Universitas Indonesia.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat